

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Perdagangan internasional mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang ia produksi untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan pendapatan nasional dan pada akhirnya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Manfaat tidak langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah (1) Perdagangan internasional membantu mempertukarkan barang-barang yang mempunyai pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang mempunyai kemampuan pertumbuhan yang tinggi, (2) Sebagai sarana pemasukan gagasan, kemampuan, dan keterampilan yang merupakan perangsang bagi peningkatan teknologi, dan (3) Perdagangan internasional memberikan dasar bagi pemasukan modal asing. Jika tidak ada perdagangan internasional, modal tidak akan mengalir dari negara maju ke negara sedang berkembang (Jhingan, 2003). Semua transaksi perdagangan internasional yang terjadi di suatu negara, terangkum dalam neraca perdagangan (*trade balance*) yang terdiri dari komponen ekspor dan impor barang dan jasa.

Dalam sebuah negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah pencapaian yang menjadi prioritas utama. Negara akan melakukan berbagai macam cara dan strategi ekonomi yang dapat menunjang tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi gambaran akan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negara yang mendiami negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena yang penting bagi suatu bangsa, masalah pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan bangsa agar dapat pula meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional (Sukirno, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau *Product Domestic Bruto riil*. (Sukirno, 2006).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia, maka diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Suindyah, 2011).

Keberhasilan Pembangunan dapat ditunjukkan salah satunya dari peningkatan Pertumbuhan Produk domestik regional bruto. Laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Utara pada periode tahun 1998-2017 mengalami fluktuasi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 5,87%, sedangkan secara nasional rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,38% (BPS: 2017). Terlihat pada tabel 1.1. berikut ini.

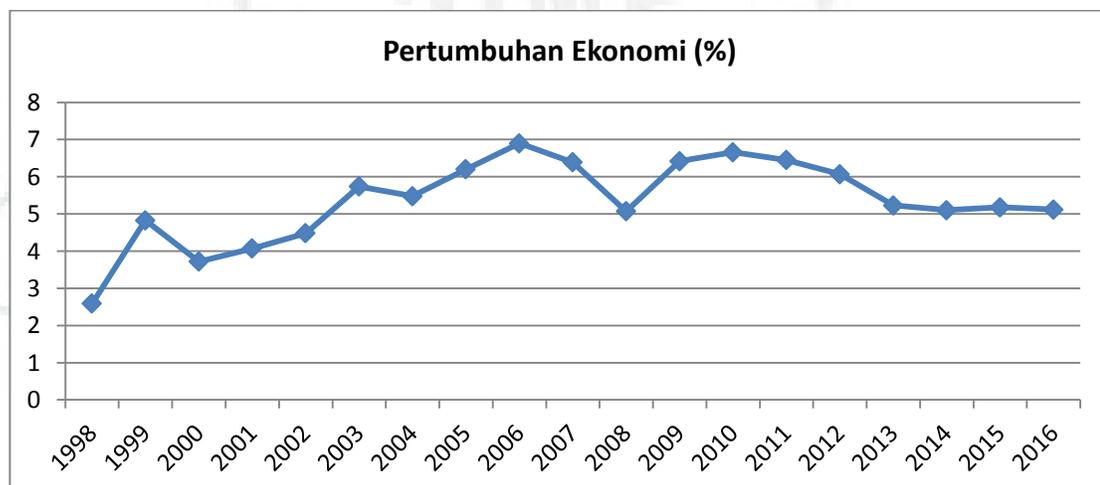
Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 1998-2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1998	-10.90
1999	2.59
2000	4.83
2001	3.72
2002	4.07
2003	4.48
2004	5.74
2005	5.48
2006	6.20
2007	6.90
2008	6.39
2009	5.07

2010	6.42
2011	6.66
2012	6.45
2013	6.07
2014	5.23
2015	5.10
2016	5.18
2017	5.12

Sumber: BPS, 2017

Pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi harus diukur dengan menganalisis PDRB dibagi atas harga konstan. Selama periode 1998-2008, perekonomian Sumatera Utara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun yaitu berkisar 3,72% sampai 6,39%. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurun dikisaran 5,07% tetapi tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan kembali dikisaran 6%. Dan di tahun 2014 dan 2017 pertumbuhan ekonomi menurun kembali dikisaran 5%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



Sumber: BPS, 2001-2017 (data diolah).

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 1998-2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,39% tetapi pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan menjadi 5.07 % ini sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara kembali mengalami kenaikan pada tahun 2010 dan tahun 2011 tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 sampai tahun 2017 Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Utara pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional.

Dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya (Mankiw, 2007).

Berikut pada tabel 1.2 disajikan data-data beberapa variabel yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 1998-2017.

Tabel 1.2 Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi di Sumatera Utara

Tahun	PMDN (Milyar Rp.)	PMA (Ribuan Dollar)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Nilai Tukar (Milyar Rp.)
1998	80.063.680	3.332	8.644.378	8.025
1999	102.716.340	5.931	7.705.624	7.085
2000	119.777.750	6.966	8.992.394	9.595
2001	528.644.950	9.251	9.023.808	10.400
2002	653.034.220	8.364	9.119.076	9.595
2003	813.693.080	82.005	7.890.583	10.400
2004	1.046.028.390	30.765	7.997.002	8.940
2005	821.643.740	27.515	8.067.008	8.447
2006	1.094.245.380	233.913	8.208.651	9.290
2007	1.672.463.330	230.204	9.378.148	9.830
2008	1.291.333.720	255.176	8.919.973	9.020
2009	2.664.965.260	107.248	9.408.738	9.419
2010	1.625.438.970	32.678	9.520.274	10.950
2011	1.904.055.780	284.441	8.759.321	9.068
2012	2.970.186.190	217.265	10.834.317	9.670
2013	3.068.881.400	682.868	8.931.423	12.189
2014	2.231.925.850	550.835	9.498.974	12.396
2015	3.287.417.300	1.246.096	9.551.041	13.787
2016	4.654.829.290	1.057.989	10.641.892	13.600
2017	5.111.683.639	1.514.942	7.743.277	13.500

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2017 (diolah).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terlihat berfluktuatif pada tahun 1998 sebesar 80.063.680 dan naik pada tahun 2001 menjadi Rp. 528.644.950 dan terus meningkat menjadi Rp. 653.034.220 pada tahun 2002, karena mendapat perhatian yang cukup besar dalam kegiatan PMDN antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada tahun 2003 PMDN terus mengalami kenaikan naik menjadi Rp. 813.693.080 dan terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi Rp. 1.046.028.390 berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat Provinsi Sumatera Utara banyak

diminati untuk melakukan penanaman modal dalam negeri, tetapi pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi Rp. 821.643.740. Namun pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.094.245.380 hingga tahun 2017 PMDN terus meningkat hingga menacapa Rp. 5.111.683.639 dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Sumatera Utara pada Tabel 1.2. Terlihat bahwa data penanaman modal asing di Provinsi Sumatera Utara tahun 1998-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diharapkan dari masuknya penanaman modal asing (PMA) dapat meningkatkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Utara dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan pekerjaan dengan kesempatan kerja. Begitu juga dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hanya saja penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami naik turun dalam penanaman modal. Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan untuk menampung jumlah tenaga kerja adalah faktor untuk menunjang kesejahteraan produk domestik regional produk (PDRB) Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Tambunan (2011) jumlah angkatan kerja terus meningkat yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan akan memperburuk pembangunan ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan di posisi kedua sektor industri pengolahan.

Diketahui bahwa pergerakan nilai tukar mengalami fluktuasi hal ini merupakan masalah karena pergerakan kurs tersebut mengalami perubahan-perubahan yang berarti di sepanjang tahun pengamatannya. Pada tahun 2010 sampai pada tahun 2013 nilai kurs mengalami penguatan hingga mencapai 10.950 US\$. Namun pada tahun 2011 hingga tahun 2012 pergerakan kurs kembali melemah, tetapi mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013 sampai dengan 2017, keadaan nilai kurs terus mengalami kenaikan menjadi 13.500 US\$. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijakan yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai impor serta pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, dan di lain pihak dapat menekan laju inflasi. Penekanan laju inflasi diarahkan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat, terutama golongan mayoritas yang banyak mengkonsumsi keperluan bahan pokok, tetapi di sisi lain juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif guna menunjang ekspor serta dapat mengatasi masalah di bidang pertumbuhan ekonomi. (Mubyarto:2000).

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara memerlukan dua faktor penting, yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk meningkatkan perekonomian. Dengan kata lain diperlukan adanya tenaga kerja yang terdidik, ahli dan terampil dalam melakukan proses produksi. Tenaga kerja yang terdidik, ahli dan terampil ini memerlukan pendidikan. Perkembangan pendidikan merupakan suatu langkah yang harus dilaksanakan pada waktu usaha pembangunan dimulai. Selain itu masalah pengembangan pengusaha

juga penting. Menurut Schumpeter bahwa golongan pengusaha sangat penting dalam menentukan sampai mana perkembangan ekonomi akan tercapai. Mereka adalah golongan peminjam atau mengumpulkan modal atau dana sendiri yang akan mengembangkan kegiatan proses produksinya (Sukirno, 2004).

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena memiliki wewenang sebagai regulator (pengatur atau pengendali). Meskipun pemerintah sebagai regulator, pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena, karena bila pemerintah tidak pandai menarik investor maka pertumbuhan ekonomi akan lambat dan lapangan kerja akan tidak bertambah melebihi pertambahan angkatan kerja. Selain itu pemerintah sebagai stimulator, dana yang dimiliki pemerintah dapat digunakan sebagai stimulan untuk mengarahkan investasi swasta atau masyarakat umum ke arah yang diinginkan pemerintah baik dari sudut jenis kegiatan maupun lokasinya (Tarigan, 2005).

Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah kebijaksanaan yang harus dapat mengatasi masalah perekonomian secara keseluruhan. Di satu pihak dapat meningkatkan ekspor sebagai penghasil devisa guna membiayai impor serta pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri, dan di lain pihak dapat menekan laju inflasi. Penekanan laju inflasi diarahkan untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat, terutama golongan mayoritas yang banyak mengkonsumsi keperluan bahan pokok, tetapi di sisi lain juga merupakan alat yang ampuh untuk mempertahankan nilai tukar (kurs) yang kompetitif guna menunjang eksport serta dapat mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan.

(Mubyarto: 2000).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan kerja (AK) dan Nilai Tukar (kurs) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh nilai Penanaman Modal Asing (PMA), nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengaruh angkatan kerja dan Nilai Tukar (kurs) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan investasi, dan Angkatan kerja dan Nilai tukar (kurs).
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti adanya temuan bahwa analisis Investasi, Angkatan kerja dan Nilai tukar (kurs) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

Sumatera Utara.

3. Sebagai referensi/perbandingan atau sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya untuk menyempurnakan model analisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi bagi perencanaan pembangunan daerah terutama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi terkait.

